

Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018)

Satria Adi Nugraha¹⁾, Doris Febriyanti²⁾, Novia Kencana³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129

Email : Satriaadinugrah03@gmail.com¹⁾, Dorishakiki@uigm.ac.id²⁾, Novia.kencana@gmail.com³⁾

Abstract

Disasters are divided into three factors, namely natural, non-natural and human factors, one of which is a fire disaster resulting in fatalities, environmental damage, property losses, and psychological impacts. In this study the objective was to find out what evaluation of the Regional Disaster Management Agency in dealing with fire disasters in the city of Palembang. This research uses the CIPP concept (context, input, process, product) developed by Stufflebean. Evaluation of the context of how to assess needs and provide an overview of the research environment, Evaluation of inputs determines the input of sources to be used, Evaluation of processes to determine the extent to which plans are implemented in the success of the program, the results in the field indicate that it has not been effective in tackling regional disasters due to limited facilities and infrastructure. The finances of the South Sumatra Province Disaster Management Agency are still very minimal or have limited costs so that disaster management has not run optimally. The implementation of education and training programs that must be carried out frequently to increase knowledge, technical capabilities of personnel and produce competent individual officers so that the program objectives of the vision and mission run optimally.

Keywords : *Evaluation, Disaster, Fire, Regional Disaster Management Agency*

Abstrak

Bencana terbagi menjadi tiga faktor yaitu alam, nonalam maupun faktor manusia salah satunya bencana kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui evaluasi apa saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan konsep CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan oleh Stufflebean. Evaluasi konteks cara menilai kebutuhan serta memberikan gambaran terhadap lingkungan tempat penelitian, Evaluasi input menentukan masukan sumber-sumber yang akan digunakan, Evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang diterapkan dalam keberhasilan program, maka hasil di lapangan menunjukkan bahwa belum efektif dalam menanggulangi bencana daerah dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Keuangan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih sangat minim atau keterbatasan biaya sehingga penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang harus sering dilakukan untuk menambah wawasan, kemampuan teknis personil dan menghasilkan individu petugas yang kompeten sehingga tujuan program visi dan misi berjalan dengan optimal.

Kata kunci : *Evaluasi, Bencana, Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1. Pendahuluan

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang bencana, bencana terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor alam, nonalam, faktor manusia Mengantisipasi efek dari bencana di Indonesia, pemerintah sebelumnya telah memiliki lembaga yang dikenal dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Di tingkat pusat, serta Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) di provinsi serta Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di kabupaten/kota. Dalam perjalanannya kemudian, untuk menata keefektifan serta meningkatkan kinerja lembaga penanggulangan bencana, sejak tahun 2008 dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, sedangkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan tersebut dibentuk untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kebencanaan yang terjadi. Dalam Bab IV UU No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang kelembagaan, dinyatakan bahwa BNPB merupakan lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun di tingkat daerah, badan dimaksud disebut dengan BPBD. Badan ini terdapat di tingkat Provinsi dan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga BNPB diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB, sedangkan ketentuan mengenai BPBD diatur dengan peraturan daerah masing-masing.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
“Evaluasi Penaggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang ?
(Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018)”

B. Tujuan penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi apa saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Palembang.

C. Metode Penelitian

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) dikembangkan oleh Stufflebeam pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Dalam pandangan Stufflebeam menyatakan “*The CIPP model is based on the view that the most important purpose of*

evaluation is not to prove, but to improve”. Konsep evaluasi CIPP tersebut menawarkan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan untuk membuktikan, tetapi juga untuk memperbaiki. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti: pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan yaitu Context, Input, Process, dan Product.

1. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Stufflebeam memaparkan evaluasi konteks, sebagai berikut: “*Context evaluation assets and opportunities to help decision makers define goal and priorities and to help relevant user judge goals, priorities and outcome*”. Evaluasi konteks dimaksudkan untuk menilai kebutuhan, masalah, asset, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya. Evaluasi konteks juga memberikan gambaran, rincian terhadap lingkungan, serta menilai kebutuhan dan tujuan secara lebih terarah. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang dilaksanakan. Hal tersebut berisi tentang kekuatan dan kelemahan obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks menurut Suharsimi Arikunto, dilakukan untuk menjawab pertanyaan: (1) kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh kegiatan program, (2) tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh program, (3) tujuan pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, (4) tujuan manakah yang paling mudah dicapai.

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Kegiatan evaluasi masukan (input evaluation) bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Komponen evaluasi masukan meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) sarana dan peralatan pendukung, (3) dana anggaran, dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses dirumuskan oleh Stufflebeam sebagai berikut: “*a process evaluation is an ongoing check on a plan’s implementation plus documentation of the process, including changes in the plan as well as key omissions and/or poor execution of certain procedures*”. Sebuah evaluasi proses merupakan pemeriksaam sedang berlangsung pada pelaksanaan rencana serta dokumentasi proses, termasuk didalamnya perubahan dalam rencana serta ketidaksesuaian kunci, dan/atau eksekusi prosedur tertentu.

Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan serta menilai dan mendeteksi implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan.

Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam program tersebut. Semua unsur yang ada mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan program tersebut.

4. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Dan untuk mengetahui hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Evaluasi produk sebagai hasil dari suatu proses diharapkan sesuai dengan rencana program yang telah disusun melalui proses. Apabila produk ini tidak sesuai dengan proses yang telah dilakukan maka produk tersebut dikatakan berhasil. Sebaliknya bila produk itu belum sesuai dengan proses maka harus dicari tahu dimana letak kesalahan tersebut.

Model evaluasi program pembelajaran tentunya bermacam-macam. Dalam penelitian ini, akan digunakan salah satu dari beberapa model tersebut. Yakni model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Dibandingkan dengan model-model evaluasi lain, model evaluasi CIPP memiliki beberapa kelebihan diantara lain: lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi mencakup konteks, masukan (input), proses dan hasil. Tentunya dengan kelengkapan formasi yang dihasilkan oleh model evaluasi CIPP akan mampu memberikan dasar yang lebih baik dalam mengambil keputusan, kebijakan maupun program-program selanjutnya.

2. Pembahasan

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian tersebut harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan

menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2012: 4)

B. Konsep Metodologi

Evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value Judgment.

Penanggulangan Bencana adalah Menurut UU No.24 Tahun 2007 serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan rumah, kerusakan hutan dan lain sebagainya.

Evaluasi penanggulangan bencana kebakaran di kota Palembang adalah kota Palembang merupakan dengan tingkat kepadatan aktivitas yang terbilang cukup tinggi sehingga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat akan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa. Fenomena kebakaran yang terjadi di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi eksisting kawasan seperti kawasan permukiman kumuh (*slums area*), permukiman liar (*squatter*) hingga kawasan industri yang kurang tertata. Kawasan-kaawasan ini memiliki tingkat kerentanan terhadap resiko bencana kebakaran dan semakin kritis apabila kesadaran masyarakat setempat terhadap resiko kebakaran masih rendah. Sebagaimana tidak di dukung oleh infrastruktur dan penataan lingkungan permukiman terhadap upaya proteksi kebakaran penangan bencana di perkotaan baik secara alami maupun non alami ataupun ulah manusia pada dasarnya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, saat dan setelah peristiwa kebakaran terjadi. penangan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak.

C. Tahapan Penelitian

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adanya observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku *stakeholder* yang terlibat dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel dalam penanggulangan di Kota Palembang

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dimana wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape recorder, kemudian dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti serta foto-foto. Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Palembang. Dimana pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dan rumusan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip-arsip yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, kemudian dari laporan status lingkungan hidup daerah Kota Palembang, dan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan mengenai penanggulangan bencana, baik di pusat maupun daerah khususnya Kota Palembang, serta dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan.

D. Indikator Penelitian

Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan dapat dilihat dari indikator kinerja penanggulangan bencana daerah di kota palembang yaitu : indikator tujuan, standar, alat dan sarana, kompetensi, dalam penanggulangan bencana daerah di Kota Palembang

1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang akan dicapai di masa yang akan datang, dengan demikian tujuan menunjukkan kearah mana pelaksanaan tugas harus dilakukan. Tujuan diharapkan mampu untuk dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu hasil yang baik dari tujuan itu sendiri.

2. Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberi tahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standarisasi dari Dinas BPBD ialah jam operasional pegawai/personil, waktu pemadaman, jarak tempuh lokasi, alat pemadaman dan keamanan.

3. Alat atau Sarana

Alat atau sarana dengan adanya kelengkapan fasilitas yang ada dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pengguna layanan yaitu berupa alat perlengkapan kebakaran dan perlengkapan untuk bencana lainnya sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan mampu memaksimalkan tugasnya dalam menanggulangi bahaya bencana daerah (Doris Febriyanti, 2017)

4. Kompetensi

Kompetensi merupakan syarat utama dalam pelaksanaan tugas maupun kinerja, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Dalam membentuk kompetensi yang baik dan menghasilkan individu yang kompeten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas personil diberikan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan pegawai/personil agar kemampuan teknis petugas dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kebakaran yang terjadi dapat direspon dengan baik.

Dari pernyataan di atas ditarik kesimpulan bahwa agar tercapainya visi, misi dan program kerja yang ada lebih efektif lagi maka tanggung jawab dan kesiapan petugas dalam merespon bencana sudah menjadi kewajiban sebagai personil BPBD agar berjalan dengan lancar maka dilakukan lah pendidikan dan pelatihan khusus personil setiap tahunnya dan program tersebut berjalan secara bergilir kepada personil khususnya di lapangan maka tujuan dari visi, misi dapat berjalan dengan optimal sehingga mehasilkan individu personil yang kompeten.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Dinas BPBD Provinsi Sumsel Terhadap Pelaksanaan Kinerja Petugas

No	Indikator	Kategori Penilaian (%)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tujuan	9	5	1	15
2	Standar	6	7	2	15
3	Alat atau Sarana	3	8	4	15
4	Kompetensi	8	7	-	15
	Persentase	43%	45%	12%	100%

Pada tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat jawaban keseluruhan responden terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban keseluruhan responden yang mengemukakan baik berjumlah 26 dengan persentase 43%. Sedangkan untuk jawaban cukup baik berjumlah 27 dengan persentase 45% dan untuk jawaban kurang baik berjumlah 7 dengan persentase 12%. Sehingga dapat dinilai bahwa “Pelaksanaan Tugas Dinas BPBD Kota Palembang dinilai cukup baik”. Selanjutnya Rekapitulasi Frekuensi Tanggapan Responden

Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas BPBD Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 2. *Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas BPBD Kota Palembang*

No	Indikator	Kategori Penilaian (%)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tujuan	5	9	1	15
2	Standar	5	7	4	15
3	Alat atau Sarana	3	8	4	15
4	Kompetensi	4	9	2	15
	Persentase	43%	45%	12%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jawaban keseluruhan responden yang mengemukakan baik berjumlah 17 dengan persentase 25%. Sedangkan untuk jawaban cukup baik berjumlah 33 dengan persentase 55% dan untuk jawaban kurang baik berjumlah 11 dengan persentase 20%. Sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan Tugas Dinas BPBD Provinsi Sumsel dinilai cukup baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara observasi Pelaksanaan Tugas Dinas BPBD Kota Palembang Pada Tahun 2016-2018 dinilai cukup baik, dimana peneliti melihat secara langsung proses pemberian pelayanan berlangsung. Dari hasil kuesioner dan wawancara serta yang dilakukan bahwa jawaban responden dari Dinas BPBD serta jawaban responden dari Masyarakat dapat disimpulkan bahwa hasil akhir penelitian "Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Palembang Studi kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 dinilai cukup baik"

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kinerja Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinilai Cukup Baik. Keberhasilan pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan kinerja tergantung pada Dinas/Instansi yang melaksanakan suatu tugas seperti Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membantu Gubernur dan Walikota dalam melaksanakan tugas. Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang dalam penanggulangan bencana dilihat dari Sumber Daya Manusia, Keuangan, Tekhnisi dapat dinilai cukup baik. Dari beberapa fokus penelitian ada beberapa unsur yang

belum terpenuhi oleh BPBD Kota Palembang untuk mencapai organisasi yang capable (berkemampuan baik) diantara nya :

1. Dari segi sumber daya manusia sudah ada pelatihan namun jarang sekali pendidikan dan pelatihan di laksanakan terhadap personel yang ada, minimal pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam setahun dua sampai tiga kali serta mengirimkan delegasi untuk mengikuti workshop atau pendidikan dan pelatihan agar lebih kompeten dalam bertugas terhadap penanggulangan bencana daerah.
2. Keuangan yang dimiliki oleh BPBD Kota Palembang masih sangat minim atau keterbatasan biaya, sehingga penanganan bencana belum berjalan secara optimal.
3. Dalam logistik manajemen bencana yang dimiliki oleh BPBD Kota Palembang terdapat kekurangan dalam jumlah kendaraan operasional mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air serta logistik peralatan yang tidak bisa terpakai lagi seperti mesin pompa air, genset, selang air dan keran nozzel yang fungsinya dalam membantu pemadaman kebakaran sehingga dalam menjalankan tugasnya belum berjalan secara optimal.
4. Tidak efektif nya sosialisasi ataupun pemberian informasi kepada masyarakat tentang potensi bencana khususnya bencana kebakaran yang mengancam di wilayah Kota Palembang. Maka dari ukuran variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang masih pada kategori cukup baik.

Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian, melihat pelaksanaan tugas yang ada penulis dengan akal yang sehat dan berfikir memberikan saran yang mana setidaknya bisa diterima oleh masyarakat dan instansi.

1. Pada realitanya masih jarang sosialisasi kepada masyarakat dan hendaknya lebih sering lagi pemberian sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti tentang bahaya kebakaran dan bagaimana pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut sehingga masyarakat setidaknya bisa dan mampu untuk meminimalisir kejadian kebakaran bahkan kejadian kebakaran tidak dapat terjadi. Serta memberikan informasi yang baik kepada masyarakat yang mendiami suatu wilayah rawan bencana khususnya bencana kebakaran di Kota Palembang
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali untuk meninjau dan mengajukan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana dengan keterbatasan alat dan sarana yang ada. yang terdiri dari pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana, serta dapat menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanganan bencana saat tanggap darurat. Demi mengefisienkan dan mengaktifkan kelancaran

waktu pemadaman, mempersingkat jarak tempuh pemadaman dengan jarak lokasi kebakaran Pada intinya harus melengkapi, menambah dan memperbaiki alat atau sarana yang ada pada saat ini.

3. Pelaksanaan program pendidikan pelatihan dan penyelamatan yang harus sering dilakukan dan berkala tidak hanya kepada petugas tetapi juga kepada masyarakat agar tercapai dengan program-program yang ada. Karena pendidikan dan pelatihan ini mampu menambah wawasan, kemampuan teknis personil atau pegawai, karena selengkap dan sebaiknya alat pemadam kebakaran kalau tidak ditunjang dengan kemampuan personil atau pegawai akan mengakibatkan ketidak lancaran suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan, dikarenakan alat pemadaman kebakaran dikendalikan oleh kemampuan pegawai/personil.

Daftar Pustaka

- Amins, Ahmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah* Yogyakarta : Laksbang Press Indo
- BNPB/“Jurnal dialog penanggulangan bencana”Volume 7/ Nomor 2/ Tahun 2016
- BNPB/“Jurnal dialog penanggulangan bencana” Volume 2/ Nomor 1/ tahun 2011
- Doris Febriyanti, 2017. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*
- Dunn,william. 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- John W, creswell. 2016. *Research design edisi ke empat* Yogyakarta : Pustaka belajar.
- Jurnal/“analisis partisipasi masyarakat melalui barisan pemadam kebakaran swadaya dalam menghadapi reesiko kebakaran di permukiman” universitas pertahanan.
- Jurnal/“pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran pemerintah bagi masyarakat mengatasi bencana” universitas medan area.
- Jurnal/“peran badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana alam” kota medan.
- Jurnal/“pedoman umum desa kelurahan tangguh bencana “BNPB” Jakarta.
- Jurnal Teknik POM ITS/ Vol 2/ Nomor 1/ tahun 2013/ “Mitigasi banjir di Jakarta Utara” Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
- Jurnal/“teknik ITS Vol 6, No.2, (2017). Analisis daerah resiko bencana kebakaran di kota surabaya.
- Jurnal/“studi sumber penyebab terjadinya kebakaran dan respon masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran” Universitas Gadjah Mada.
- Mangkunegara, 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia* Bandung : PT Refika aditama.
- Moleong, lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Mustofa, AR . 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*.
- Radit, Diyah Lituhayu, 2010 *Manajemen bencana dalam menanggulangi bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semarang Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta